

GENUINE PROGRESS INDICATORS SEBAGAI PENDEKATAN ALTERNATIF MENUJU EKONOMI BERKELANJUTAN

LM Syuhada Ridzky¹, La Ode Agus Said², Siti Kadri Yanti Sari³

Universitas Halu Oleo

Correspondent author: syuhadaanggara@gmail.com

Kendari 93232, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This article aims to discuss how measuring economic growth such as GDP or GRDP in the context of a region no longer translates the reality of society. Using a literature review approach, this article explains how the Genuine Progress Indicator (GPI) can be the latest alternative towards a sustainable economy. There are two important findings from this analysis: first, GPI can act as a catalyst for paradigm change in understanding economic growth holistically. Second, this change in mindset will be a reference for policy making that supports the green economic agenda and accelerates the transition to renewable energy.

Keywords: Genuine Progress Indicator (GPI); Green Economy; Gross Domestic Product (GDP); Sustainable; renewable energy

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi seperti PDB atau PDRB dalam konteks suatu daerah tidak lagi menerjemahkan realitas masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, artikel ini menjelaskan bagaimana Genuine Progress Indicator (GPI) dapat menjadi alternatif terkini menuju perekonomian berkelanjutan. Terdapat dua temuan penting dari analisis ini: pertama, GPI dapat berperan sebagai katalisator perubahan paradigma dalam memahami pertumbuhan ekonomi secara holistik. Kedua, perubahan pola pikir ini akan menjadi acuan pengambilan kebijakan yang mendukung agenda ekonomi hijau dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Kata Kunci: Berkelanjutan; Energi terbarukan; Ekonomi Hijau; Indikator Kemajuan Asli (GPI); Produk Domestik Bruto (PDB)

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

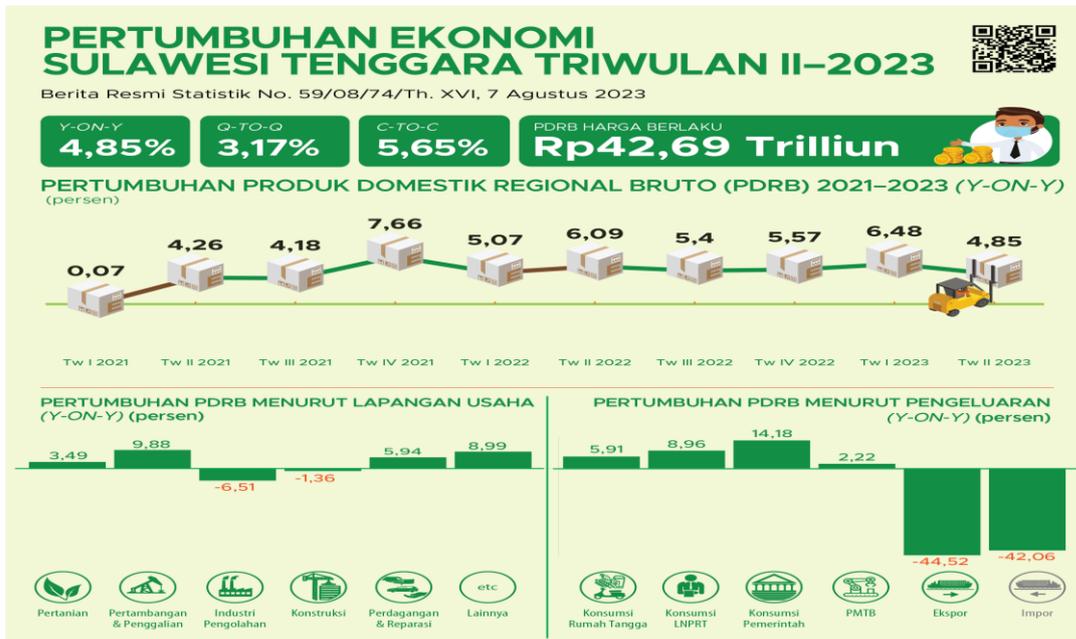
Kekayaan alam dan mineral yang tertimbun di dalam perut bumi Sulawesi Tenggara menjadi "surga" investasi. Pada 2021, realisasi investasi di Sulawesi Tenggara mencapai Rp27 Triliun. Pada triwulan II 2022, realisasi investasi menembus angka Rp10,63 Triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp34,73 Triliun. Dari seluruh investasi yang masuk di Sulawesi Tenggara, sektor pertambangan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi.

Pertambangan akan berdampak langsung pada lingkungan. Jumlah investasi yang masuk ke sektor ini menunjukkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi metode sederhana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Otoritas banyak berbicara dan melancarkan lobi-lobi elit terkait strategi menggaet investor asing maupun

dalam negeri tapi tidak satupun yang memiliki kapasitas untuk berbicara mengenai *enviromental ethics*.

Masifnya investasi yang terserap di bidang sumber daya alam, jika tidak dibarengi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas memungkinkan terjadinya insiden ekologi yang pastinya akan merembet pada risiko peningkatan biaya sosial dan lingkungan. Hal ini tentu akan mengakibatkan target pencapaian agenda *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* yang harus menurunkan persentase emisi karbon akan semakin kritis. Pemerintah Sulawesi Tenggara, sebagai otoritas di daerah perlu melakukan terobosan fundamental dalam menjalankan agenda pembangunannya. Salah satunya adalah dengan bertransisi menuju aktivitas ekonomi rendah karbon (*circular economy*), yang dapat diawali dengan perubahan paradigma dalam memaknai pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. Infografis PDRB Sulawesi Tenggara



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara

Daerah Tempat Tinggal	Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara Menurut Desa/Kota (Ribu Jiwa)					
	2021		2022		2023	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Kota	75,05	71,02	69,94	73,71	79,89	-
Desa	243,65	252,25	239,85	241,04	241,64	-
Kota+Desa	318,70	323,26	309,79	314,74	321,53	-
Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara						
Data tahun 2005 Kondisi Juli, tetapi pada tabel tetap dikelompokkan pada kondisi Maret						

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Solusi yang banyak didiskusikan adalah kebijakan transisi energi menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh parameter seperti Produk Domestik Bruto (GDP) masih menjadi tolok ukur utama bagi kemajuan suatu negara/daerah. Ironisnya dengan tetap mempertahankan instrumen tersebut, secara bersamaan pemerintah juga mendorong program-program *green economy*. Ini paradoks, mengingat perhitungan PDRB mengesampingkan indikator sosial dan lingkungan.

Review Kajian

1. Sustainable Economy

Hal krusial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi adalah *sustainability*, yang berarti perlu mempertimbangkan habitat dan daya dukung lingkungan sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang bersifat multi-dimensi.

Gagasan *sustainable economy* ada sejak tahun 1990-an. Dalam upaya pencapaian target pembangunan, ekonomi dan ekosistem saling terkait secara intrinsik. Layanan ekosistem, seperti penyediaan air bersih, udara bersih, dan penyediaan pangan, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tetapi sering kali diabaikan dalam perhitungan ekonomi tradisional seperti PDB, (Costanza, R., dkk. 1997).

Costanza (1997) berpendapat bahwa untuk mencapai ekonomi berkelanjutan, kita harus memperhitungkan nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan mengembangkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Dalam perspektif Malthus, sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial. Produksi dari sumber daya alam akan mengalami apa yang disebut sebagai *diminishing return* di mana *output* perkapita akan mengalami kecenderungan yang menurun sepanjang waktu. Lebih jauh lagi perspektif Malthus melihat bahwa ketika proses *diminishing return* ini terjadi, standar hidup juga akan menurun sampai ke tingkat subsisten yang pada gilirannya akan memengaruhi reproduksi manusia.

Pandangan kedua adalah pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif Ricardian. Dalam pandangan ini dikemukakan bahwa sumber daya alam dianggap sebagai "mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang mentransformasikan sumber daya alam ke dalam "*manmade capital*" yang kemudian menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa mendatang.

2. GDP dan GPI dalam Sustainability

Gross Domestic Product (GDP)/ Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada waktu tertentu. PDB dapat dijadikan tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dalam skala daerah

disebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/ penyediaan, pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir serta pendekatan pendapatan. (BPS *Catalog* 9301005.74:2023).

Di era 1930-an, ekonom Simon Kuznets dan John Maynard Keynes merancang sebuah perhitungan agregasi ekonomi untuk membantu pengambil kebijakan mengeluarkan solusi atas *the Great Depression* yang melanda Eropa. Tujuannya untuk mengkalkulasi berapa total nilai uang yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa sehingga ada gambaran yang utuh tentang situasi ekonomi. Kuznets mengesampingkan beberapa indikator-indikator negatif, sehingga ketika angka GDP meningkat tidak serta merta pemerintah dapat mengklaim diri bahwa kesejahteraan masyarakat semakin baik pula.

Namun ketika *World War II* pecah, Keynes berseberangan dengan pandangan Kuznets. Menurutnya seluruh indikator positif maupun negatif, harus dihitung agar mudah dalam mengidentifikasi basis produksi mana dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan perang. Pendekatan Keynes tersebut dimaksudkan untuk mengukur capaian ekonomi dalam situasi kepentingan perang. Itulah sebabnya penghitungan GDP sangat *single-minded*, GDP menghitung jumlah uang yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi tanpa memedulikan apakah aktivitas tersebut destruktif. Konsep ini terus lestari digunakan hingga era modern sekarang. Kegagalan GDP dalam mengkalkulasi perubahan yang terjadi pada ketersediaan modal baik bersumber dari alam maupun non-alam mendorong Daly dan Cobb (1990) membangun *Index of Sustainable Economic Welfare* (ISEW) yang kemudian dikembangkan kembali oleh Cobb, Halstead dan Rowe (1995) dengan istilah *Genuine Progress Indicator* (GPI), Indeks ini memberi penekanan khusus pada penghitungan biaya lingkungan. Konstruksi GPI dibentuk dari pemahaman bahwa komunitas masyarakat tidak hidup dalam satu kesatuan sistem ekonomi saja, melainkan berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat itu sendiri tertanam dalam lingkungan alam.

METODE

Artikel ini disusun secara kualitatif dengan penekanan pada analisis literatur. Data dikumpulkan dari buku, jurnal internasional, dan laporan akademis yang membahas konsep GPI serta implementasi di berbagai negara, dan dampaknya pada ekonomi berkelanjutan. Kami menyusun, mengkategorikan dan menggabungkan temuan-temuan literatur untuk membangun argumen yang kokoh tentang bagaimana GPI dapat menjadi pendekatan alternatif yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Secara metodologis, data yang tersedia mungkin terbatas pada kualitas literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Genuine Progress Indicators (GPI)*

Dari *figure 01* Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp 42,69 triliun. Perekonomian Sulawesi Tenggara pada Triwulan II-2023 secara tahunan tumbuh sebesar 4,85 persen. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, secara *year on year*, sektor pertambangan dan galian memberi kontribusi terbesar yakni 9,88 persen. Pertumbuhan tersebut disebabkan besarnya suntikan dana asing yang mengalir ke Sulawesi Tenggara di sektor pertambangan yang mencapai Rp27,932 triliun. Khusus Kabupaten Konawe sebagai sentra industri pertambangan di Sulawesi Tenggara mendapat kucuran hingga Rp20,056 Triliun. Dari total investasi yang masuk, Rp23,6 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp4,334 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PDM) (Kendari Pos ; 2023 :1)

Rilis Kementerian Investasi/BKPM RI menyebut investor di Sulawesi Tenggara berasal dari sejumlah negara. Terdapat gabungan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Hongkong, nilainya mencapai Rp16,297 triliun. Investasi murni dari RRT sendiri sebesar Rp4,71 triliun. Sedangkan dari *British Virgin Island* sebesar Rp75,293 miliar dan investasi dari Belanda sebesar Rp32,388 miliar. Kesemua donatur itu adalah negara maju yang tipologi ekonominya didominasi sektor jasa. Negara-negara ini tidak mengeksplorasi kekayaan alamnya secara masif. Mereka lebih memilih berinvestasi di sektor sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga. Karena mereka memahami risiko ekologi.

Angka fantastis itu menunjukkan ambisi begitu besar pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi secara eksponensial. Para ekonom di daerah, politisi bahkan otoritas sendiri masih fokus dengan agenda untuk meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB. Secara tidak langsung, meningkatkan PDRB berarti juga terus menggenjot produksi dan konsumsi. Konsep ini secara kolektif menjadi *mindset* dan secara hegemonik menjadi pembenaran dalam mengeksploitasi sumber daya alam.

Ada banyak prinsip-prinsip dalam PDRB justru abai terhadap konsep *sustainability* itu sendiri. Melakukan aktivitas ekonomi yang mengarah pada deforestasi tentu akan berimbas pada peningkatan produksi lapangan usaha sektor kehutanan, kemudian angka PDRB pun

terungkit. Membelah gunung dan perbukitan di Konawe untuk ditambang tentu menyebabkan persentase PDRB akan meningkat drastis. Aktivitas produksi semacam itu tentu meninggalkan residu yang nilainya tidak ter-cover dalam penghitungan PDRB. PDRB tidak menghitung berapa nilai kerugian akibat kehilangan kawasan hutan yang menjadi *carbon sink*.

Suatu daerah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi lewat perhitungan PDRB minimal sebesar 2 hingga 3 persen tiap tahun agar sistem ekonomi tetap sehat dan berfungsi. Jika pertumbuhan mendekati 0, dapat dikatakan daerah tersebut mengalami krisis. Jika di triwulan II PDRB Sulawesi Tenggara sebesar Rp 42,69 triliun, maka di tahun selanjutnya pada triwulan yang sama pemerintah Sulawesi Tenggara minimal harus menambah Rp 1,26 triliun untuk mengejar pertumbuhan. Sehingga secara eksplisit, kapasitas produksi harus ditingkatkan, eksploitasi diperluas, jam kerja ditambah dan lain-lain sebagainya.

Struktur ekonomi saat ini cenderung tidak akan memberi pengaruh pada perilaku hidup konsumtif yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi. Dalam telaah "*Hicksian income*", keberlanjutan merupakan jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang atau suatu bangsa selama periode waktu tertentu dan tetap berkecukupan pada akhir periode seperti pada awalnya (Hicks 1946: 172).

Ada dua tugas utama dari GPI. Pertama, dalam meredefinisi "konsumsi", GPI mengacu pada penggunaan dan pemakaian barang dan jasa oleh individu, rumah tangga, atau pemerintah. Konsumsi ini bukan hanya mengacu pada belanja barang dan jasa yang dihitung dalam neraca nasional, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain yang berdampak pada kesejahteraan. Sehingga mampu menggabungkan faktor-faktor yang tidak selalu terlihat dalam transaksi pasar, seperti dampak lingkungan, kualitas hidup, distribusi pendapatan, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, untuk mengkalkulasi keberlanjutan dalam konsumsi dengan memasukan unsur-unsur yang dapat memberi dampak terhadap perubahan nilai modal atau sumber daya.

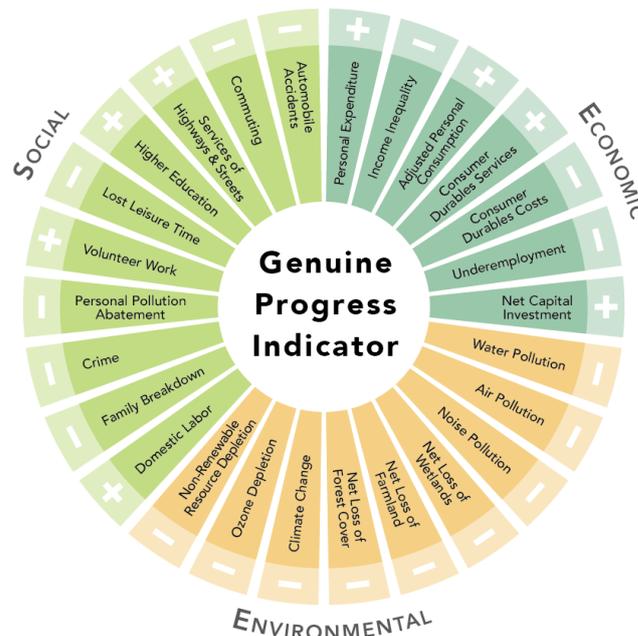
Mempertimbangkan barang dan jasa yang tidak diperdagangkan dalam definisi konsumsi memiliki signifikansi penting, karena pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur mungkin tidak merefleksikan lebih dari sekadar peralihan aktivitas dari sektor nonpasar ke sektor pasar. Ini merupakan isu yang telah dikenal dalam diskursus *sustainable development*. Ini menjadi jelas ketika merujuk pada hal-hal domestik, seperti pekerjaan rumah tangga, dan prinsip ini berlaku sama terhadap layanan "gratis" lainnya. Contoh yang relevan adalah PDRB dapat menunjukkan penurunan "jika seorang pria menikah dengan pengurus rumah tangganya," sementara PDRB bisa meningkat jika ada

biaya masuk untuk mengakses taman nasional (rekreasi) atau keputusan keluarga untuk makan di luar lebih sering.

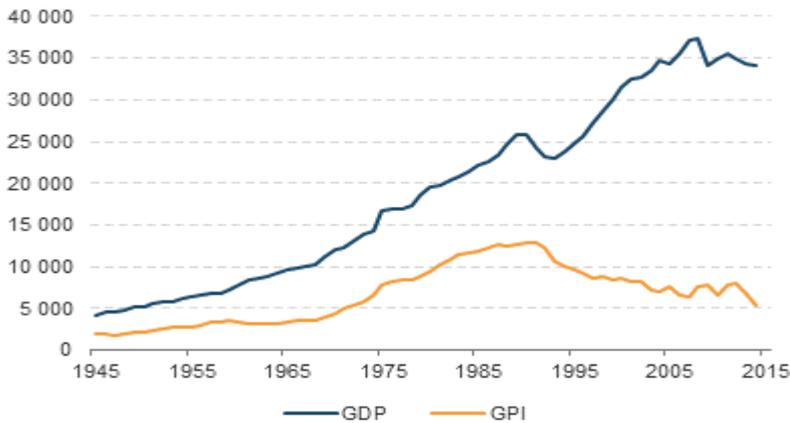
Model pertumbuhan eksponensial dari PDRB (GDP) justru menjadi penyebab utama dari munculnya krisis ekonomi itu sendiri. Oleh sebab itu dari titik inilah seharusnya pendekatan dalam memandang pertumbuhan secara holistik perlu diubah guna memberi andil dalam aktivitas *green economy*. Sebab perhitungan PDRB (GDP) tidak merefleksikan realitas sesungguhnya dari masyarakat, maka langkah krusial selanjutnya adalah menyingkirkan PDRB dan menggantinya dengan GPI.

Basis metodologis GPI ialah memasukan satu pengukuran yang memberikan konsep baru terhadap capaian ukuran kesejahteraan. GPI memasukkan unsur yang menyebabkan perubahan pada lingkungan, kondisi sosial, perputaran uang hingga ketersediaan modal. GPI menambahkan indikator positif seperti pekerjaan rumah tangga dan kerja-kerja *volunteerism*. Kemudian memasukan indikator negatif berupa polusi, kehilangan sumber daya, kriminal dan kesetaraan, dll.

Gambar 3. Genuine Progres Indicator (GPI)



Sebagai perbandingan, dibawah ini adalah tren perbandingan GPI dan PDB (GDP) di Finlandia dari tahun 1945-2014. Ilustrasi menunjukan kesenjangan yang melebar antara PDB (GDP) dan GPI. Kurva GPI terlihat melemah, akibat ada "*hidden costs*" yang tidak tersorot dalam PDB (GDP). Pertumbuhan kesenjangan nampak sejak awal tahun 1990an. Kesenjangan antara kedua ukuran tersebut memuncak pada tahun 2007 hampir €31.000 per kapita sebelum turun sedikit. Kesenjangan ini terlihat stabil (stagnan) hingga tahun 2012, kemudian kembali berselisih kembali hampir €29.000 pada tahun 2014. Penurunan selisih ini akibat Finlandia telah menerapkan konsep-konsep *green economy* untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4. Trends of GPI and GDP for Finland, 1945-2014
 (€ per capita, real prices (2010 prices))

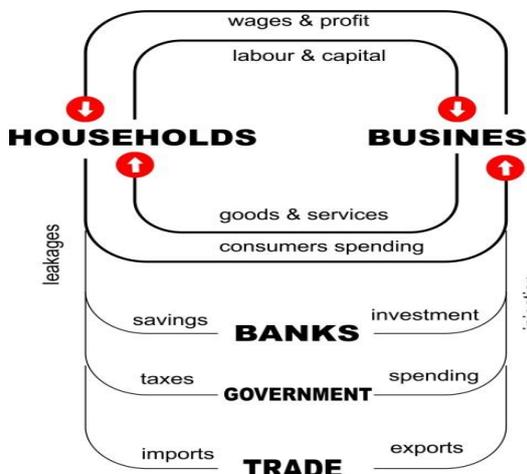
Source: Hoffrén (2011).

2. Green Job dan Renewable Energy sebagai Implikasi GPI

Saat ini, tidak hanya beberapa negara di dunia, bahkan pemerintah Sulawesi Tenggara masih menganut prinsip ilmu ekonomi tradisional yang berfokus pada luaran ekonomi. Aktivitas ekonomi berkisar antar pembeli dan penjual, *business as usual*, tanpa melihat aktivitas tersebut secara makro, (lihat gambar 5). Dengan alasan itu, implementasi konsep *sustainable development* (lihat gambar 6) penting, sebagai metode pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sumber daya alam sangat terbatas dan lingkungan hidup harus dikelola dengan hati-hati agar tidak habis digunakan atau rusak secara permanen.

Gambar 5. Traditional Economic Flow

Gambar 6. Chart of Sustainable Development



The Circular Flow diagram, which for 70 years was the defining depiction of the macroeconomy



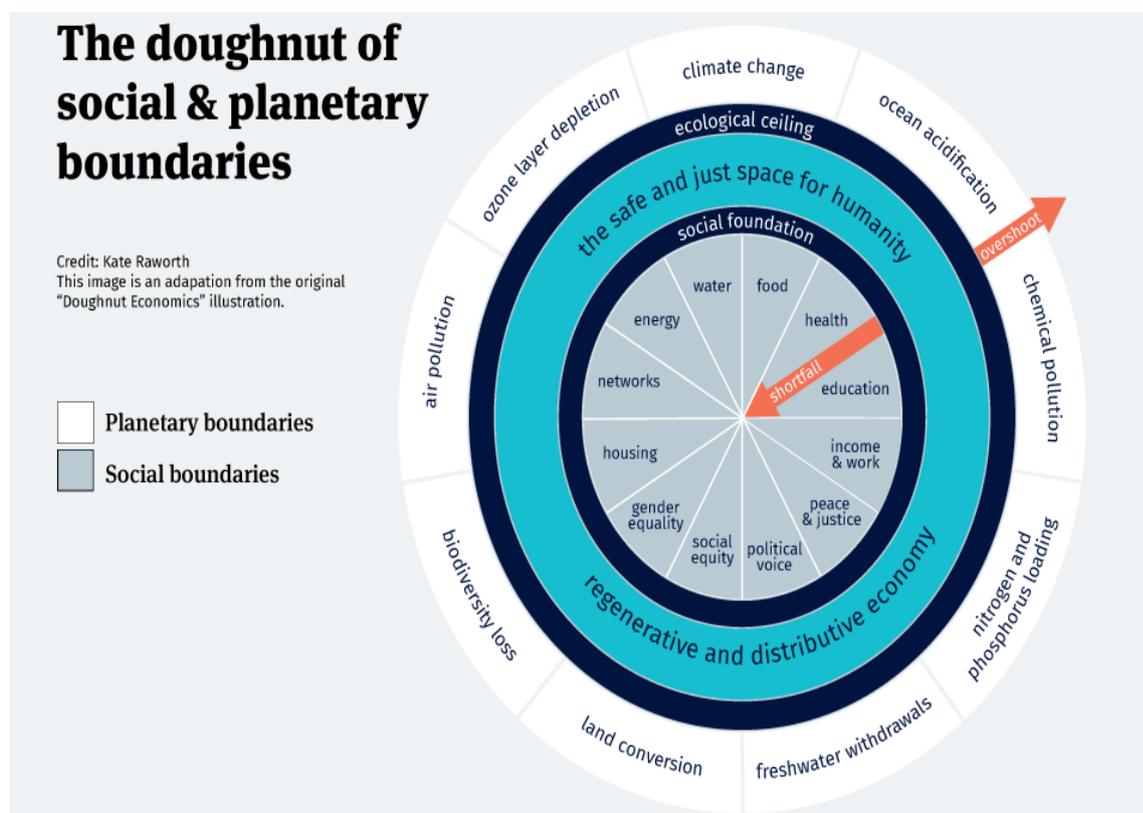
Kate Raworth, seorang ekonom asal Inggris, membuat model ekonomi yang disebut "*Doughnut Economics*". Tujuan dari gagasan ini adalah untuk membangun sistem ekonomi

yang inklusif, berkelanjutan, dan mengakui keterbatasan Bumi. Konsep ini digambarkan kedalam grafis berbentuk cincin donat, (lihat gambar 7).

Metode *Doughnut Economics* melibatkan dua hambatan utama yang harus dipertahankan dalam struktur ekonomi:

- a. Batas Kemiskinan Bawah (*Inner Boundary*) ialah batas minimal standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh semua orang yang hidup di Bumi. Faktor-faktor seperti akses makanan, air bersih, sanitasi, pendidikan, perumahan, dan kesehatan adalah bagian dari ini. Batas ini dibuat untuk menjaga agar tidak ada orang yang hidup di bawah ambang kemiskinan.
- b. Batas Lingkungan Atas (*Outer Boundary*), batas-batas ini mengatur penggunaan sumber daya alam seperti air, energi, dan sumber daya non-daur ulang agar tidak melampaui daya dukung planet. Melebihi kapasitas ini dapat merusak ekosistem yang mendukung kehidupan.

Gambar 7. The Doughnut Economic Chart



Unsur-unsur yang merekonstruksi ekonomi tradisional, *sustainable development* dan konsep *doughnut economics* terangkum kedalam model perhitungan GPI. Dengan memahami indikator yang menyusun GPI secara holistik pemerintah akan lebih terarah dan tepat sasaran dalam menciptakan kebijakan untuk mendongkrak ekonomi namun tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

GPI akan melahirkan *green job* dan percepatan transisi *renewable energy*. GPI akan memaksa pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dalam sektor-sektor yang dapat menghasilkan barang/jasa yang bermanfaat bagi lingkungan. Pengukuran GPI akan mengubah pola pikir dalam konstruksi hijau, mempromosikan sektor bisnis yang kompatibel dengan prinsip *sustainability*, serta menciptakan UMKM berkelanjutan sebagai *trigger* munculnya *green job*.

GPI dan *green job* semakin relevan dalam proses percepatan transisi energi dan membuka peluang kerja berbasis *green economy* yang signifikan. Berdasarkan data dari *Institute for Essential Services Reform (IESR)* dan Katadata, transisi energi justru akan membuka lapangan pekerjaan baru dan menghindari risiko pengangguran massal. Sebagai contoh, di sektor batubara membutuhkan 1 pekerjaan di tiap *megawatt* yang dibangun, sedangkan transisi ke energi semisal panel surya membutuhkan setidaknya 10 pekerjaan per *megawatt*, (lihat *gamabr 8*).

Gambar 8. Potensi Lapangan Kerja Sektor Energi Terbarukan. (Sumber IESR)



Berdasarkan infografis potensi lapangan kerja sektor energi terbarukan dalam negeri pada 2030, ditaksir penambahan kapasitas listrik bersumber dari tenaga bayu hingga 7.040 MW dengan jumlah potensi pekerjaan mencapai 166.848. Di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara salah satu sumber energi terbarukan yang potensial ialah pemanfaatan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu). Bersama PT. Envision Green Energy Indonesia, pemerintah Kabupaten Bombana telah menyepakati kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga angin di Kecamatan Tontonunu, Bombana, sebanyak 170 turbin dengan kapasitas kontrak 850 MW. Dari jumlah itu estimasi produksi listrik per tahunnya bisa mencapai 2.163.426 MWH. Potensi energi angin di Kecamatan Tontonunu sangat besar. Topografi yang strategis,

menjadikan kawasan itu mampu menghasilkan angin dengan kecepatan 6,27 meter/detik. Ini merupakan sumber daya baru yang harus segera ditangkap untuk memenuhi pasokan energi terbarukan di daerah, yang tentunya akan berdampak langsung pada perekonomian warga lokal. Menggunakan GPI akan melahirkan banyak *green job* serta percepatan transisi energi ke PLTB dengan sendirinya akan mentransformasi pasar dan *lifestyle*.

KESIMPULAN

Transisi ke ekonomi yang lebih adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis adalah hal yang kompleks dan membutuhkan indikator komprehensif dari GPI. Kesejahteraan sosial-berkelanjutan ekologis lebih prioritas dibandingkan dengan indikator ekonomi dalam PDRB. GPI menjadi instrumen yang kritis dalam menilai dampak pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan semua jenis tekanan terhadap lingkungan seperti jejak material, penggunaan air, perubahan lahan, polusi, limbah, atau kerugian biodiversitas, dan tidak hanya gas rumah kaca.

Negara-negara maju di dunia telah menggunakan GPI dan berhasil bertransisi ke dalam ekonomi yang berkelanjutan. Lewat aturan otonomi daerah, pemerintah Sulawesi Tenggara dapat mengambil kebijakan inovatif sebagai *milestone* percepatan menuju *sustainable development*. Rekomendasi kebijakan yang disarankan berupa:

- a. Mengubah strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan GPI angka-angka dalam PDRB (GDP) akan terkoreksi sehingga pemerintah akan lebih mudah memahami skenario pembangunan.
- b. Transformasi dari sektor ekonomi seperti pertanian dan pertambangan agar lebih mengedepankan prinsip pelestarian.
- c. Transformasi kapasitas, mulai dari SDM, teknologi, infrastruktur dan *financial resources*.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2023). "Gross Regional Domestic Product of Sulawesi Tenggara Province by Expenditure 2018-2022." Catalog 9301005.74.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2023). "Indikator Statistik Terkini Provinsi Sulawesi Tenggara." Katalog 3102034.74.

Cobb, C., Halstead, T., & Rowe, J. (1995). "If the GDP is Up, Why is America Down?". In M. E. Tucker (Ed.), "State of the World 1995: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society" (pp. 3-16). Norton.

Costanza, R., dkk. (1997). "The value of the world's ecosystem services and natural capital." *Nature*, 387(6630), 253-260.

- Fauzi, Akhmad, PhD. (2006). "Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi". PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamilton, Clive. 1997. The Genuine Progress Indicator: A new index of changes in well-being in Australia, 14. The Australia Institute.
- Hickel, J. (2018). "The Divide: Global Inequality from Conquest to Free Markets". W.W. Norton & Company.
- Kendari Pos, 2023. Mendulang Triliunan Rupiah: Realisasi Investasi Tembus RP 10,63 Triliun. Diakses Juni 2023 halaman 1
- Kuznets S (1962). How to Judge Quality. New Republic. 20 October:29-31.
- Seminar Nasional Administrasi Negara FIS UNP. 2017. Tantangan dan Prospek Administrasi Publik Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Pada Tahun 2030. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, 7 Oktober
- Parrique, Timothée. 2021. From Green Growth to Degrowth. Global Policy. Page 1-7
- Raworth, Kate. (2017). "Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist." Chelsea Green Publishing.